

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi selalu menjadi perhatian penting pada setiap negara, dan setiap negara memiliki permasalahan ekonominya masing-masing. Namun terdapat sebuah masalah yang selalu timbul di setiap negara, apakah negara maju atau negara berkembang, masalah itu adalah kemiskinan. Kepopuleran masalah ini memiliki dampak yang sangat luas, untuk itu penelitian berkaitan dengan kemiskinan hingga saat ini terus dilakukan.

Menteri keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan terdapat tiga indikator dasar yang mempengaruhi sebuah negara mampu atau tidak menjalani ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat, ketiga indikator itu adalah Kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Kemiskinan, khususnya di Indonesia seperti menjadi ancaman yang tidak berkesudahan, kemiskinan tidak bisa dibiarkan dan pergi begitu saja, kemiskinan merupakan masalah skala besar yang menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi pemerintah sebagai pembuat peraturan di setiap negara.

Mengapa kemiskinan menjadi musuh besar bangsa? Terkait pertanyaan tersebut adalah dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan, dalam segala aspek masyarakat kemiskinan memberikan dampak buruk

didalamnya, sosial, ekonomi, serta budaya. Begitu banyak dan kompleks dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan, dan setiap masalah memiliki kesinambungan, mulai dari pengangguran hingga kriminalitas, dan masih banyak lagi.

Kemiskinan di dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa sebab, terdapat paradigma penyebab kemiskinan yang paling terkenal berasal dari Neo-Liberal dan Sosial Demokrat, Neo-Liberal mengatakan penyebab kemiskinan berasal dari individu masing-masing, artinya bagaimana individu bersikap akan menentukan kemampuan individu tersebut lepas dari kemiskin. Sedangkan Sosial Demokrat mengatakan penyebab kemiskinan berasal dari struktur ekonomi politik yang mempengaruhi kemiskinan seseorang. Kemiskinan struktural yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan.¹

Indonesia tidak ada yang memungkiri bahwa kekayaan alamnya melimpah, dan juga tanah beserta kekayaan alam termasuk factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.² semestinya dengan faktor kekayaan tersebut Indonesia akan dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sejak tahun 2006 hingga sekarang terdapat tren penurunan jumlah penduduk miskin dengan total hingga tujuh persen, meskipun demikian pemerintah merasa hal itu belum cukup

¹ Nugroho, Iwan, dan Dahuri, Rochmin. 2014. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Hal-165. Jakarta: LP3ES

² Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada

karena laju penurunan tersebut mengalami perlambatan setiap tahunnya. Hal ini menyampaikan bahwa di Indonesia pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Mohamad Ikhsan dalam studinya, dalam menanggulangi kemiskinan pertumbuhan ekonomi memang penting tetapi tidak cukup.³

Gambar I.1: Angka Kemiskinan di Indonesia



Sumber: data sekunder diolah tahun 2017⁴

Indonesia menempati posisi ke empat jumlah penduduk terbanyak didunia, publikasi Badan Pusat Statistika total penduduk Indonesia sebanyak 260 juta orang, sekitar 10 persennya merupakan warga miskin, atau dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Selama kurang lebih satu dekade terakhir terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, tercatat pada tahun 2007 penduduk miskin sebanyak

³ Ikhsan, Mohamad. 2010. Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Lembaga Penerbit

⁴ <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>

37.168.300 orang hingga tahun 2015 penduduk miskin sebanyak 28.513.570 orang. Secara umum terlihat penurunan jumlah penduduk miskin hampir mencapai 10 juta orang, namun jika diamati lebih dalam lagi, sesungguhnya laju penurunannya justru mengalami perlambatan, meski sedikit berfluktuasi di lima tahun terakhir namun secara keseluruhan laju penurunan penduduk miskin mengalami perlambatan. Artinya semakin lama kebijakan pengentasan kemiskinan semakin usang dan perlu diteliti lagi apakah program-program dalam kebijakan tersebut masih layak dipertahankan atau diperbaharui.

Di Indonesia, merujuk pada pandangan Sharp, et.al, penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.⁵

⁵ Yulianto, K. 2010. Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. Jurnal Ekonomi: Universitas Negeri Gorontalo.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari pembangunan negara, karena sumber daya manusia sama pentingnya bahkan dalam beberapa wilayah lebih penting dari sumber daya alam. guna mencapai tujuan tersebut negara mengupayakan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pembangunan manusia pada masyarakatnya. Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia.⁶

Menurut Human Development Report (1990) Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.⁷ Sementara negara mengejar angka pertumbuhan secara kuantitatif namun kurang memperhatikan dari segi kualitatif, padahal jika keduanya di seimbangkan, permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan dapat ditanggulangi.

Indeks Pembangunan Manusia termasuk dalam salah satu indikator pengklasifikasian negara maju, berkembang, atau terbelakang. Karena didalam IPM, meskipun tidak semua, termuat indikator pokok atau dasar

⁶ Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2012. Badan Pusat Statistika. ISSN:2086-2369

⁷ *ibid.*

kualitas masyarakatnya. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) Terdapat tiga indikator pokok yaitu, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan penghasilan.⁸ Angka harapan hidup terkait dengan umur panjang dan hidup yang sehat, tingkat Pendidikan terkait dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan penghasilan terkait pengeluaran perkapita,⁹ namun pada tahun 2010 terjadi perubahan metode dilakukan, salah satunya adalah mengubah angka melek huruf dengan angka harapan lama sekolah.

Gambar I.2.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2012

Di Indonesia, IPM terus menjadi perhatian guna mencapai tujuan pembangunan, meskipun Indonesia masih dalam kategori negara berkembang dengan nilai IPM 70 hasilnya dapat terlihat pada gambar I.2

⁸ UNDP. 1995. Human Development Report. New York: Oxford. Pg: 15

⁹ Publikasi IPM. Opcit.

dimana IPM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, jika disandingkan dengan tingkat kemiskinan yang juga terus menurun pada gambar I.1, maka terlihat korelasi negatif antara keduanya, hal ini secara sederhana menampakkan kemampuan IPM dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam usahanya memperbaiki perekonomian dan mengentaskan kemiskinan, pemerintah melalui APBN menyisihkan porsi khusus untuk subsidi. Kebijakan tersebut selain untuk mengatasi distorsi pasar juga menjadikan masyarakat miskin dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dengan pendapatan mereka. Namun masalah timbul ketika subsidi yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai target, penggunaannya dinilai masih salah sasaran¹⁰, selain itu kerap kali subsidi dijadikan komoditas politik.

Tabel 1.1.

Laju Penurunan Kemiskinan Atas Subsidi BBM

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penurunan	Realisasi Subsidi
2007	37,168,300	5.42	150,214,443,691,269
2008	34,963,300	5.93	275,291,454,173,929
2009	32,530,000	6.96	138,082,160,271,329
2010	31,023,400	4.63	192,707,049,527,199
2011	30,018,930	3.24	295,358,229,636,324
2012	28,594,600	4.74	346,420,404,182,332
2013	28,553,930	0.14	355,045,179,958,292
2014	27,727,780	2.89	391,962,514,288,102
2015	28,513,570	(2.83)	185,971,113,912,629

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017¹¹

¹⁰<http://bisnis.liputan6.com/read/2662957/aturkembalisubsidipemerintahinginlindungihakorangmiskin?source=search> (diakses 3/2/17)

¹¹ <http://www.bphmigas.go.id/c/realisasi-bbm-subsidi> & <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3laccordion-daftar-subjek1>

Dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014, total subsidi yang terealisasi mencapai 391 triliun rupiah, jumlah ini menjadi yang terbesar selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Sementara pada tahun 2015 total subsidi yang terealisasi mencapai 185 triliun rupiah, penurunan yang sangat signifikan dibanding tren kenaikan realisasi subsidi tiap tahunnya. Penyebabnya adalah kebijakan yang diambil pada tahun 2015 yaitu penurunan subsidi BBM, BBN, dan tabung Gas LPG 3Kg berjumlah pemotongan hingga 190 triliun, pemerintah beralasan Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif, dan juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.¹² Jika dibuat perbandingan dengan persentase penurunan jumlah penduduk miskin, fluktuasi subsidi secara keseluruhan tidak terlalu berdampak pada jumlah penduduk miskin. Meskipun demikian subsidi terus digelontorkan hingga detik ini, apakah subsidi khususnya yang berjenis energi masih menjadi kebijakan yang dapat diandalkan dalam mengentaskan kemiskinan atau sebaliknya kebijakan ini sudah usang dan perlu di perbaharui. Dengan kata lain pengaruh kebijakan subsidi BBM terhadap kemiskinan semakin lama terindikasi semakin berkurang. Peneliti memutuskan untuk meneliti variabel subsidi BBM atau kebijakan yang diambil pemerintah sebagai bagian dari variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

¹² <http://setkab.go.id/rapbn-p-2015-subsidi-bbm-tinggal-rp-818-triliun-anggaran-subsidi-tinggal-rp-232-triliun/> (diakses 10/2/17)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kemiskinan di Indonesia diantaranya disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Subsidi BBM muncul atas usaha pemerataan pemerintah kepada penduduk miskin
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penduduk miskin sulit berkembang lantaran akses permodalan yang terbatas sehingga usaha-usaha mereka untuk keluar dari kelompok penduduk miskin terus terhambat.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, anatarlain adalah, keterbatasan sumberdaya, keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya modal. Peneliti memutuskan hanya mengambil dua faktor dari ketiga faktor, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan subsidi BBM dari faktor keterbatasan sumberdaya. Peneliti beralasan karena data kedua factor tersebut datanya tersedia dan dipublikasi pemerintah. Selain itu pada rentang waktu tahun 2005 hingga sekarang, dibatasi penelitian ini hanya pada rentang tahun 2008-2012 dikarenakan pada rentang waktu itu terjadi krisis global yang berdampak pada perekonomian kawasan Asia termasuk Indonesia, serta dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain: dana dan waktu. Maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Subsidi BBM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008 - 2012”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama rentang waktu 2008-2012?

2. Apakah terdapat pengaruh antara Subsidi BBM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama rentang waktu 2008-2012?

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian dapat dijadikan tambahan literatur tentang ekonomi berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan subsidi BBM, dan kemiskinan. khususnya sebagai tambahan literatur di fakultas ekonomi. Selain itu juga diharapkan menjadi tambahan ilmu tentang permasalahan ekonomi yang terjadi, khususnya kepada masyarakat dalam menyikapi masalah Indeks Pembangunan Manusia. Dan diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi kebijakan subsidi dan melakukan kegiatan ekonomi lebih baik lagi.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijadikan masukan untuk pemerintah selaku pemegang wewenang dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan.